

REZIM PEMBANGUNAN INTERNASIONAL: DARI DISKURSUS HEGEMONIK HINGGA KEPENGATURAN POLITIK

Dewi Setyaningsih

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional - Kajian Kerjasama dan Pembangunan Internasional, Universitas Gadjah Mada

Email : dwsetyajoikromo@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan dan kesenjangan telah menjadi masalah paling memprihatinkan bagi komunitas internasional sejak beberapa dekade silam. Gagasan untuk menuntaskan masalah ini telah memunculkan norma pembangunan yang menjadi rezim pembangunan internasional. Makalah ini menjabarkan tentang masalah dalam rezim pembangunan internasional dan bagaimana konsep tersebut secara wajar diadopsi oleh negara-negara berkembang sebagai model pembangunan utamanya. Makalah ini mengkombinasikan dua pendekatan kritis untuk menganalisa konsep pembangunan tersebut, yaitu pendekatan poskolonial yang dikembangkan oleh Gayatri Spivak dan Governmentality yang dikembangkan oleh Michele Foucault. Poskolonial dipakai untuk menganalisa masalah dalam konsep pembangunan internasional dan governmentality menganalisa bagaimana konsep pembangunan tersebut diadopsi secara wajar dalam struktur politik global. Makalah ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan internasional yang didefinisikan oleh organisasi inter-governmental seperti Perserikatan Bangsa-bangsa mengandung gagasan yang hegemonik dan ternormalisasi melalui institusi internasional, organisasi pemerintah maupun non pemerintahan.

Kata kunci: pembangunan internasional, rezim pembangunan, developmentalism.

ABSTRACT

Poverty and inequality has been being most concern problem for international community in decades. The idea to tackle these problems then created the development norm which becomes international development regime. This paper examines the problem of international development concept and how the conception is normally adopted by the developing countries as the main development model. It combines two critical approach to analyze, postcolonial perspective developed by Gayatri Spivak and governmentality developed by Michele Foucault. Postcolonial perspective is used to analyze the problem of international development concept, while governmentality is used to analyse how the conception is adopted normally through the global political structure. It shows that the concept of international development defined by inter-governmental like UN (United Nations) contains hegemonic idea which is practiced normally through international institutions, governmental and non governmental organization.

Keywords: Keyword: international development, development regime, developmentalism.

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dunia II telah mengubah tatanan politik global terkesan lebih manusiawi, seperti lahirnya gagasan mengani pembangunan. Konsep-konsep tersebut perlahan berkembang dan menghasilkan institusi-institusi internasional yang menjadi badan penyelenggaranya. Standar pembangunan yang dibentuk oleh institusi-institusi tersebut perlahan menjadi acuan standar norma pembangunan di negara-negara berkembang. Namun, sekian dekade berlalu, masalah kemiskinan dan ketimpangan global tidak kunjung teratasi

ditengah laju komitmen dan diskusi mengenai pembangunan di hampir segala forum internasional. Laporan Oxfam Internasional menunjukkan data kekayaan para pemilik modal mengalami peningkatan signifikan dan di tingkat individu kelas pekerja tidak mengalami penambahan pendapatan per kapita (Oxfam, 2018). Mengapa ketimpangan global dan kemiskinan justru terus tumbuh di tengah komitmen norma pembangunan yang juga tumbuh dalam forum-forum internasional?

Proyek pembangunan PBB yang selama ini terkenal dan dipropagandakan oleh kalangan pemerintah, praktisi, akademisi maupun masyarakat sipil melalui organisasi komunitas sosial bernama *Millenium Development Goals* (MDGs) setelah 15 tahun berjalan tidak cukup signifikan dalam mencapai target ambisinya (Hickel, 2017) lalu dialihkan ke program lanjutan bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Samir Amin (2006) melihat MDGs sebagai konsep pembangunan yang gagal dan justru butir-butir poinnya mengindikasikan celah-celah neoliberalisme. Namun, Samir Amin belum cukup komprehensif dalam membongkar relasi kuasa yang berlangsung dalam lensa ekonomi politik sehingga masih menyisakan tanya mengenai hal-hal yang membuat MDGs secara sistematis rancu dalam logika pembangunan dan gagal menjamin penuntasan kemiskinan di negara dunia ketiga. Penelitian ini akan meninjau lebih lanjut mengapa konsepsi pembangunan tersebut bermasalah dan bagaimana konsep tersebut terus diterapkan menjadi standar pembangunan di negara-negara sedang berkembang.

KERANGKA ANALISIS

Riset ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari data-data sekunder, yaitu literatur ilmiah dan dokumen-dokumen yang terkait. Kerangka teori yang digunakan adalah pendekatan Poskolonial dan Foucauldian. Dua pendekatan ini akan dikombinasikan untuk mengurai relasi kuasa ekonomi dan pengetahuan dalam pengarusutamaan agenda pembangunan internasional.

Pertama, untuk memahami sekaligus mengkritik pemaknaan atas pembangunan yang dihasilkan dari diskursus pembangunan internasional, penulis menggunakan perspektif poskolonial yang dikembangkan Gayatri Spivak. Kritik poskolonial Spivak ditujukan pada pemikiran modern ala Barat yang mendominasi diskursus pengetahuan. Dalam hal tersebut, Spivak memandang pengalaman-pengalaman di negara bekas jajahan berbeda dengan pengalaman Barat, maka teori-teori yang dikembangkan terkesan konstitutif dan menghegemoni (Hartwick, 2015).

Penulis meminjam konsep rezim yang diperkenalkan oleh John Ruggie dalam memandang konsep-konsep pembangunan internasional seperti MDGs dan SDGs. Pendefinisian rezim menurut Ruggie adalah titik temu dari kepentingan, ekspektasi, dan identitas pihak yang turut serta dalam perumusan rezim tersebut. Ruggie menyarankan agar institusi dipandang sebagai perwujudan dari suatu rezim melalui suatu proses institusionalisasi (Ruggie, 1982). Dengan demikian, dalam mengidentifikasi rezim tidak dimulai dari institusi atau organisasi internasional dimana rezim terinstitusionalisasi, melainkan pada proses institusionalisasi tersebut.

Selanjutnya penulis menganalisis bagaimana rezim pembangunan tersebut menjadi sebuah praktik institusi menggunakan teori Governmentality. Governmentality berguna untuk mengidentifikasi bagaimana wacana diskursif pembangunan dimaknai secara *taken for granted* melalui konsep kepengaturan yang akhirnya menyetting agenda pembangunan negara-negara dunia ketiga. Meskipun governmentality tidak berbicara dalam spektrum global, namun secara logika ia bisa diterapkan dalam arena internasional sebagai bentuk pemerintahan, dalam lembaga-lembaga internasional, sementara tubuh sosial diasosiasikan dengan negara-negara. Hal ini untuk melihat implikasi praktik dari konsep pembangunan internasional terhadap tatanan lembaga internasional di negara-negara berkembang.

Gagasan Foucault tidak hanya berkuat pada determinisme ekonomi seperti Marxian, namun juga mengidentifikasi relasi kuasa pengetahuan. Foucault (1980) mengamati pernyataan yang dirasionalisasi dan diorganisasi oleh para ahli yang olehnya disebut wacana. Menurutnya, pernyataan dari para ahli yang mendapat legitimasi baik melalui perkuliahan, artikel ilmiah, buku non fiksi, review seseorang akan mendapat validitas kebenaran. Wacana dianggap benar karena epistemologinya dipercayai terpisah dari hal fiksi. Dalam hal itulah wacana dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan kuasa (power). Wacana memiliki struktur sistematis yang dapat dianalisis secara arkeologis (mengidentifikasi elemen dasarnya dan relasi-relasinya yang membentuk menjadi wacana) dan secara genealogi (bagaimana wacana dibentuk oleh praktik sosial nondiskursif, terutama institusi kuasa).

Dalam *Discipline and Punish* (1977) Foucault menjabarkan logika disiplinisasi yaitu membuat tubuh individu patuh dan disiplin melalui sistem sosial non-diskursif. Logika ini dianalogikan dengan istilah Panoptikon, yaitu ilustrasi tahanan penjara yang dikelilingi beton dan setiap sudutnya terdapat militer yang memantau setiap gerak-geriknya, dengan begitu si tahanan merasa diawasi sehingga harus bersikap patuh. Dari pemikiran

pengendalian tubuh, Foucault menyelidiki lebih lanjut mengenai kepatuhan yang dibuat dari lembaga-lembaga pemerintahan, yang disebutnya Governmentality, jika sebelumnya hanya tubuh individu, dalam Governmentality yang disasar adalah tubuh sosial (populasi). Kontrol terhadap tubuh sosial tersebut tidak terjadi secara koersif namun halus dan bahkan tidak disadari oleh tubuh sosial karena secara diskursif dianggap sebagai kebenaran (Burchell, 1991). Praktik semacam ini pula yang terjadi dalam konsep pembangunan internasional di negara-negara berkembang. Setelah direproduksi secara berulang-ulang sebagai wacana kebenaran, konsep pembangunan internasional juga menjadi praktik formal di lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial.

PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Internasional: Dari Wacana ke Rezim Hegemonik

Istilah pembangunan awalnya muncul berkat inisiasi Truman melalui rancangan Four Points, yang didalamnya terkandung istilah pembangunan (*development*) dan keterbelakangan (*underdevelopment*). Nomenklatur tersebut semata-mata sebagai sarana politik luar negeri Amerika terhadap negara-negara lain dengan tujuan memperluas pengaruhnya di area internasional. Hal ini juga dikenal sebagai politik luar negeri donor karena Amerika memberikan bantuan donor berupa dana segar kepada negara-negara korban perang guna merekonstruksi infrastrukturnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa inisiasi ide pembangunan awalnya bersifat politis (Rist, 2008)

Four Point menawarkan narasi bahwa negara-negara kaya di Eropa dan Amerika Utara adalah negara maju yang berada di posisi *Great Arrow of Progress* karena lebih cerdas inovatif dan giat bekerja serta ditopang oleh nilai, institusi dan teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara Selatan dunia miskin dianggap belum menemukan kebijakan yang tepat, sehingga menyebabkan negara-negara ini masih tertinggal, terbelakang dan dalam tahap berjuang untuk mengejar ketinggalan. Hal ini membuat negara-negara maju merasa bertanggungjawab untuk menolong negara-negara di Selatan. Lewat inilah ide-ide tentang mengenai cita-cita pembangunan diatur oleh negara Utara (Hickel, 2017).

Pada 1978 World Development Report menyatakan bahwa upaya pembangunan harus diarahkan pada pertumbuhan cepat yang objektif dan pengurangan angka kemiskinan secepat mungkin. Idennya adalah untuk menggunakan sumber yang ada demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat guna memperluas layanan publik dan untuk sementara waktu, memenuhi kebutuhan dasar menjadi pendekatan institusi keuangan internasional. Pendekatan ini diterjemahkan dalam Keynesianism global yang berujung pada ide pemasifan

investasi di negara dunia ketiga dengan dalih meningkatkan secara cepat produktivitas ekonomi di negara dunia ketiga melalui investasi asing (Hartwick, 2015). Kisah sukses pembangunan yang berdampak pada wacana pembangunan ini datang dari ekonomi Asia Timur Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Di negara-negara tersebut, kemiskinan turun secara signifikan di tengah tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor yang mendasarinya antara lain: reformasi tanah di Korea Selatan dan Taiwan (yang diberlakukan oleh Amerika setelah perang), penyebaran awal pendidikan dasar, dan pertumbuhan permintaan untuk tenaga kerja tidak terampil dalam industri ekspor padat karya. Pada titik tersebut, liberalisasi perdagangan menjadi anjuran yang diserukan dan lembaga-lembaga finansial pemberi kredit untuk tahap industrialisasi demi tujuan pembangunan (Kanbur, 2009).

Konferensi di Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 memiliki dua agensi yang digadang sebagai sarana penting dalam proses pembangunan selama paruh kedua abad 20 hingga sekarang yaitu IMF dan World Bank. IMF didesain untuk menolong negara melalui pinjaman dana segar dalam jangka pendek sementara World Bank yang semula bernama International Bank for Reconstruction and Development menjamin pinjaman bank swasta untuk investasi jangka panjang dalam aktivitas produksi. Namun, sebenarnya para sarjana dan tokoh politik menetapkan struktur dan tujuan kedua organisasi ini sebagai penjaga stabilitas pasar keuangan global (Gas, 2016).

Teori pembangunan modernisasi ini menyatu dengan sedirinya bersama praktik-praktik institusi. Pendekatan modernisasi yang dikembangkan dari doktrin Amerika ini dibarengi dengan perkembangan metode-metode sains berbasis kuantitatif sehingga dapat diarahkan pada teori-teori *problem solving*, maka, teori sosiologi yang berkembang pun cenderung bercorak mendukung *status-quo*, yaitu teori Talcott Parson, *structural-functional*. Hal ini untuk mendukung legitimasi konsep pembangunan. Para ekonom dan sosiolog yang terlibat dalam perancangan program pembangunan pun dari USAID dan World Bank (Sylvester, 1999). Dengan demikian, jebakan pembangunan dipintal oleh industri internasional yang berkembang dari lembaga bilateral, swasta, multilateral bahkan hingga akademis.

Lembaga finansial memiliki peran penting dalam menopang rezim pembangunan internasional yang bercorak neoliberalisme tersebut, seperti dalam penelitian Juichi Inada (Inada, 2017) berikut ini:

Tabel 1. Evolution of International Development Assistance Regime

Period	Degree of development	Major actors	Principles, norms, and rules
1945 - 1960	Establishment of an international development assistance regime	United States, World Bank	Restoration of the capitalist world economy
1960s	Expansion of the number of developing countries, improvement in the aid bureaucracy of each donor	US, UN, World Bank, and DAC Secondary: other bilateral donors	Recognition of the North-South issues and the responsibilities of developed countries for the South
1970s	Changes in the world economic system, search for desirable international development assistance regime.	US, UN, World Bank, DAC, Secondary: G-7 (Group of developing countries)	North-South conflict (demands for the new international economic order (NIEO), focus on basic human needs (BHN).
1980s	Establishing of a structural adjustment regime (partial)	World Bank, IMF, UN, and major bilateral donors (particularly G-7)	Liberal structural reforms, conditionally
1990s	Global expansion of the structural adjustment regime, joint responses to global challenges	World Bank, UN, and major bilateral donors (particularly G-7)	Structural reforms (market mechanism and open economic system), conditionally, common values (democratization, the environment, etc)
2000s-later	Establishment of the PRS regime (as an expansion of the structural adjustment regime to cover social issues), joint responses to global challenges (increasing partnership)	Partnership led by the World Bank and the UN, major bilateral donors (particularly G-8) Secondary: NGOs and government of developing countries	Importance of poverty reduction and governance, linkage between reform efforts and aid, common values and procedures (increasing partnership)

Sumber : Inada, J. (2017). Evolution of International Development Assistance Regime—Harmonization of Aid Policies among Major Donors and Its Structure. Retrieved Juli 2018, from <https://www.researchgate.net/publication/242754526>

Ditopang berbagai lembaga finansial dan legitimasi politik global, konsep pembangunan telah membentuk norma yang terlembagakan. Memasuki dekade millenium, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sepakat merancang komitmen pembangunan berjangka 15 tahun yang dinamai MDGs. MDGs telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana pembangunan dilanjutkan dengan SDGs (Battersby, 2016). Melalui instrumen-instrumen yang terlembagakan tersebut, pengontrolan dilakukan secara teknis melalui perangkat-perangkat pengawasan dari program pembangunan internasional, misalnya, dalam MDGs, terdapat 33 organisasi internasional, termasuk lebih dari 20 badan PBB, Bank Dunia dan OECD yang berfungsi sebagai instrumen pengawas 22 target MDGs dengan 43 indikator (Whitman, 2011).

Namun, MDGs rupanya gagal mencapai target-targetnya sekalipun telah ditopang oleh berbagai donor dari International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), International Development Bank (IDB) dan donor bilateral lain semisal AUSAid dan USAid. MDGs dan SDGs juga telah menjadi standar di rencana pembangunan nasional setiap negara anggota PBB dengan implementasi ditopang dari donor-donor tersebut, baik melalui pemerintahan langsung maupun masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM). Menggunakan kerangka analitik poskolonial Spivak (1988), negara-negara berkembang bekas kolonial yang didefinisikan sebagai “primitif” dan terbelakang tersebut menjadi objek pengadaan program-program sosial, diteliti dan dihitung perkembangan proyek pembangunannya melalui PDB tersebut merupakan kelompok subaltern. Dalam hal ini, subaltern tidak memiliki kendali untuk mendefinisikan pengetahuan akan pembangunan itu sendiri. Sementara itu, narasi-narasi yang dibangun mengenai keberhasilan pembangunan diterjemahkan oleh negara-negara maju tersebut melalui ukuran-ukuran yang disepakati di level rezim dimana sarat akan diskursus developmetalisme yang hegemonik.

Sejak akhir ke-20 pembangunan sebenarnya telah menunjukkan dirinya sebagai konsep yang sangat problematik karena semakin kehilangan janji-janjinya. Para ahli teori anti-developmental berpendapat bahwa, alih-alih melepaskan kolonialisasi, justru melangsungkan kontinuitasnya melalui pelestarian sikap yang *western-centric*, yaitu validitas sains dan pengetahuan Barat (Sharp, 2004). Ide pembangunan sebagai ideologi tidak membawa dampak positif bagi negara dunia ketiga yang dililit kemiskinan dan kesenjangan antara negara selatan dan utara pun tak kunjung dapat direda, ditambah lagi degradasi lingkungan justru kian meningkat. Di sisi lain, identitas kultural dan nilai-nilai

lokal menjadi semakin kabur akibat modernisasi yang merupakan buah gagasan pembangunan.

Menurut para pemikir poskolonial, pembangunan yang mengacu pada proyek modernisasi justru membuat ketimpangan semakin tajam. Dihadapkan dengan berbagai kegagalan pembangunan, beberapa ahli teori dan praktisi pembangunan mengkritik pendekatan modernisasi karena didasarkan pada transfer ilmu dan teknologi dari Utara ke Selatan, hal tersebut membuat pengetahuan pribumi yang memiliki nilai-nilai luhur menjadi termarjinalkan (Sharp, 2004). Fanon (dalam Hickel, 2017) juga menjelaskan bahwa kemiskinan di negara-negara Selatan bukan merupakan kondisi alamiah. Kemiskinan pada dasarnya hasil dari proses penjarahan yang sedang berlangsung—proses yang menguntungkan sekelompok kecil orang dengan mengorbankan sebagian besar kelompok lainnya.

Paradigma bantuan memungkinkan negara-negara kaya dan individu terlihat seolah-olah memperbaiki negara miskin, yang di sisi lain mereka eksploitasi alam dan manusianya melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Adalah sebuah delusi untuk percaya bahwa bantuan adalah solusi yang sepadan, apalagi jujur dan bermakna, untuk masalah semacam ini. Landasan moral yang menjadi basis dalam merancang program-program pembangunan internasional hegemonik perlu ditelaah secara sistematis dari sudut pandang ekonomi politik.

Rezim Pembangunan Hegemonik dalam Praktik Kepengaturan Politik

Meskipun bersifat hegemonik, model pembangunan internasional telah menjadi praktik dalam agenda pembangunan, sebab konsep-konsep tersebut telah memasuki tahap kepengaturan. Tahap kepengaturan itu tercermin dalam pengadopsian prinsip-prinsipnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah nasional ataupun lembaga masyarakat. Angelis (2016) menjelaskan bahwa kepengaturan pembangunan neoliberal tersebut terjadi dalam dua lapis. Lapis pertama, yakni praktik perancangan diskursus di level global yang membentuk disiplin. Lapis pertama menunjukkan makna pertama dari berbagai makna dan merujuk pada pengaturan cara, dalam sebuah struktur pemerintah dan sistem regulasi. Sementara lapis kedua, melalui pelaksanaan dalam aspek kehidupan atau bisnis, cara hidup, perilaku, sikap dan atau tindakan.

Lapis pertama kepengaturan pembangunan neoliberal sendiri berangkat dari diskursus yang berevolusi. Saad-Filho (2011) membagi evolusi ini dalam tiga tahap untuk memahami neoliberalisme, yaitu paradigma Neoliberal pra-Konsensus Washington,

Neoliberal Konsensus Washington, dan Neoliberal Paska-Konsensus Washington (PKW). Tiga evolusi diskursus tersebut berkembang dalam forum-forum internasional yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan publik di negara-negara berkembang.

A. Neoliberal Pra-Konsensus Washington (1970-an – 1980-an)

Pandangan Neoliberal Pra-Konsensus Washington mengamati ketimpangan global disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan di negara-negara Selatan. Solusi dari pandangan ini adalah negara berkembang butuh melakukan transisi melalui modernisasi ke model kapitalisme maju dimana agenda-agenda pembangunannya membutuhkan ongkos besar melalui proyek-proyek investasi, termasuk kepemilikan publik di sektor-sektor utama. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai syarat utama pembangunan. Tujuannya agar tercipta kesempatan kerja, stabilitas makroekonomi yang berdampak menghapus kemiskinan melalui efek “tetesan ke bawah”.

B. Neoliberal Konsensus Washington (1980-an – 1990-an)

Pandangan Neoliberal Konsensus Washington (KW) muncul tahun 1980-an dan akhir 1990-an sebagai ideologi neoliberal yang berkomitmen pada pasar bebas. Wacana-wacana yang muncul sebagai analisa persoalannya seperti masalah korupsi dan inefisiensi. Kanbur (2009) menganalisis elemen dasar dalam KW menyebabkan reformasi kebijakan pembangunan yang menghasilkan 10 agenda, yakni: disiplin fiskal, tatanan ulang prioritas belanja publik, reformasi pajak, liberalisasi suku bunga, nilai tukar yang kompetitif. Saya takut saya terlibat dalam pemikiran semu dalam menyatakan bahwa ada konsensus yang mendukung memastikan bahwa nilai tukar akan kompetitif, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi langsung asing, privatisasi, deregulasi, hak milik (Hak Kekayaan Intelektual/HKI).

C. Neoliberal Pasca-Konsensus Washington (pertengahan 1990-an – sekarang)

Inti proses kebijakannya yaitu mekanisme pasar yang terlihat manusiawi melalui hubungan sosial, distribusi hak milik, jaminan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Paradigma tersebut berdampak pada pengkooptasian konflik dan perjuangan kelas dalam pembangunan akibat pendekatan manajerial-teknokratik yang dilakukan dalam politik (Caroll, 2010). PKW melengkapi apa yang tidak ada dalam KW, yaitu elemen regulasi, kompetisi, dan transparansi. Paradigma ini menekankan pada perluasan pasar liberal dan meraih efisiensi pasar liberal dengan pengaturan

kapitalisme dan peran negara pada isu-isu sosial, seperti mendorong kebijakan pro-poor dan pelibatan warga (miskin) dalam perencanaan penganggaran pembangunan. Di lapis kedua kepengaturan, agenda dilakukan dengan ciri mendasar, yakni: pertama, ia dibentuk oleh sebuah jaringan beragam aktor sosial yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah (lokal, nasional ataupun supranasional) serta bisnis dan organisasi masyarakat sipil. (Angelis, 2016). Kedua, sebagai konsekuensinya, ia merupakan sebuah kerangka pengorganisasian bagi tindakan aktor yang relevan, yang memiliki beragam kepentingan sekaligus nilai dalam mengkoordinasikan tindakan sosial.

Bentuk lapis kedua kepengaturan tersebut dapat dilihat melalui program-program World Bank di Indonesia tahun 2000-an merujuk pada penelitian Tania Muray Li. Penelitian Li (2007) menyelidiki program pemerintah pada awal abad milenium melalui strategi Bank Dunia. Program tersebut bernama 'Pembangunan Sosial.', merupakan hasil dari akumulasi pengetahuan dan praktik neoliberalisme di mana konsep persaingan dan akuntabilitas terlihat dominan. Dalam program tersebut, strategi yang digunakan melalui penggabungan elemen-elemen neoliberal dengan konsep partisipasi dan pemberdayaan yang dipromosikan oleh LSM, tujuannya untuk mengubah masyarakat menuju ke perbaikan. Program tersebut (1998–2003) dilaksanakan dipuluhan ribu desa di seluruh nusantara melalui serapan dana pinjaman sebesar US \$ 1 miliar yang bersumber dari separuh pinjaman Bank Dunia ke Indonesia pada tahun 2001 (Li, 2007).

Bank Dunia tidak lagi menysasar pemerintah, namun justru masyarakat. Dalam praktik tersebut, pertama-tama Bank Dunia menggerakkan jaringan-jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai aktor sosialnya. Pemahaman yang dibentuk oleh Bank Dunia bahwa masyarakat desa memiliki modal sosial yang cukup untuk mengelola dirinya sendiri, maka, isu-isu yang diangkat oleh Bank Dunia pada waktu itu adalah transparansi, demokratisasi dan swakelola desa. Pada periode yang serupa, rezim pembangunan di belahan bumi selatan memiliki rasa frustrasi terhadap rekayasa sosial oleh negara, pengelolaan komperhensif terhadap kehidupan politik dan ekonomi yang dianggap gagal. Di titik ini, pemerintah bergeser, bukan lagi melenakan, namun memberdayakan, menyemangati dan memfasilitasi melalui agenda-agenda program LSM.

Paradigma pembangunan neoliberal ini diarahkan pada membangun kemandirian masyarakat melalui stimulus modal, bukan pada kerangka struktur sosial-politik-ekonominya. Sebagai konsekuensi, masyarakat secara teknis diarahkan untuk berpikir rasional, menyusun prioritas dari beberapa opsi yang tersedia. Contoh dari fenomena ini

dapat dilihat melalui program Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Output yang dihasilkan dari program tersebut adalah proposal pembangunan yang dikompertisikan guna bersaing mendapatkan hibah, pelatihan ini agar kedepannya masyarakat paham bagaimana cara mengundang investor. PPK juga melatih secara teknis prosedur pemberantasan korupsi, meningkatkan kapasitas lokal dan manajemen konflik. Masyarakat diajari menyelesaikan konflik dengan aktif dalam kegiatan ekonomi melalui penciptaan iklim yang merangsang pembangunan ekonomi di daerah konflik. Dengan begitu, investor mudah diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, kedatangan investasi justru memunculkan konflik-konflik agraria (Li, 2016).

KESIMPULAN

Rezim pembangunan internasional adalah konsep yang lahir dari sebuah konteks politik pasca perang dunia II dengan diawali oleh doktrin Truman. Diskursus pembangunan yang dipopulerkan di era tersebut demi merestrukturisasi kepentingan ekonomi Amerika. Doktrin ini lalu berkembang sebagai norma hingga melembaga seiring dengan dibentuknya forum-forum internasional. Pada abad 20-an, diskursus pembangunan mulai menuai kritik dari para pemikir kritis karena konsepsinya yang hegemonik dan bercorak neoliberal. Namun, diskursus mengenai pembangunan internasional justru mengalami proses rezimentasi yang lebih kuat melalui pengarusutamaan diskursusnya di forum-forum internasional.

Seiring dengan itu, konsepsi ini menjadi *role model* yang diterapkan dalam struktur politik dan teknis program di negara-negara berkembang. Disinilah kepengaturan itu berlangsung dengan halus dan menciptakan konsekuensi kemiskinan dan ketimpangan dengan adanya efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*), alih-alih kesejahteraan. Kepengaturan, pembangunan neoliberal tersebut terdiri dari dua lapis. Lapis pertama, yakni praktik perancangan diskursus di level global yang membentuk disiplin. Sementara lapis kedua, melalui pelaksanaan kehidupan atau bisnis, cara hidup, perilaku, sikap dan atau tindakan. Selama konsep pembangunan yang dipakai landasan oleh negara-negara berkembang adalah konsepsi pembangunan yang lahir dari rezim internasional, maka, cita-cita kesejahteraan tetaplah utopia. Oleh karenanya, negara perlu meninjau kemiskinan dari dimensi dan aspek sosial, politik, budaya lokal dan menentukan aspek kesejahteraan dari analisis yang berbasis masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (2006). The Millenium Development Goals: A Critique from the South . *Monthly Review*.
- Angelis, M. D. (2016). Ekonomi Politik Governance Neoliberal Global. In M. H. (Peny), *Petaka Neoliberalisme (Terj)* (pp. 1 - 36). Yogyakarta: Intrans Publishing.
- Battersby, J. (2016). MDGs to SDGs – new goals, same gaps: the continued absence of urban food security in the post-2015 global development agenda. *African Geographical Review DOI: 10.1080/19376812.2016.1208769*, 1 -15.
- Burchell, G. (1991). *The Foucault Effect: The Studies in Governmentality*. US: The University of Chicago Press.
- Caroll, T. (2010). *Delusions of Development: The World Bank and The Washington Consensus in Southeast Asia*. UK McMillan: Palgrave Macmillan.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: Tge Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Order Writings 1972-1977*. New York: Phanteon Books.
- Gas, M. M. (2016). The World Bank and IMF in Developing Countries: Helping or Hindering? *International Journal of African and Asian Studies*. Vol. 28, 38-49. <https://core.ac.uk/download/pdf/234690231.pdf>
- Hartwick, R. P. (2015). *Theories of Development: Contentations, Arguments, Alternatives*. US: The Guilford Press.
- Hickel, J. (2017). *The Divide*. UK: Penguin Press.
- Inada, J. (2017). *Evolution of International Development Assistance Regime— Harmonization of Aid Policies among Major Donors and Its Structure*. Retrieved Juli 2018, from <https://www.researchgate.net/publication/242754526>
- Kanbur, R. (2009). The Co-Evolution of the Washington Consensus and the Economic Development Discourse. *Macalester International: Vol. 24*, Article 8. DOI: 10.22004/ag.econ.48920
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve Governmentality, Developmentand the Practice of Politics*. Durham & London : Duke University Press.
- Li, T. M. (2016). *Petaka Neoliberalisme*. Yogyakarta: Intrans.
- Oxfam. (2018). *Rewar Work, Not Wealth*.
- Rist, G. (2008). *The History of Development: From Western Origins to Global Faith*. UK: Zed Books.
- Ruggie, J. G. (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the =Postwar Economic Order. *International Organization 36(2)* .
- Saad-Filho, A. (2011). Growth, Poverty and Inequality: Policies and Debates from the (Post-) Washington Consensus to Inclusive Growth. *Indian Journal of Human Development, Vol. 5, No. 2*, 321-344. <https://doi.org/10.1177/0973703020110202>
- Sharp, J. B. (2004). Indigenous knowledges and development: a postcolonial caution. *Third World Quarterly 25:4 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01436590410001678915*, 661-676.
- Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? *Die Philosophin*, 42-58.

- Sylvester, C. (1999). Development studies and postcolonial studies: Disparate tales of the 'Third World. *Third World Quarterly* 20:4 DOI: 10.1080/01436599913514, 703-721.
- Whitman, N. K. (2011). The Millennium Development Goals and Development after 2015. *Third World Quarterly*, 32:1 DOI: 10.1080/01436597.2011.543823, 181-198.